

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindari kesalahpahaman, maka penulis mengemukakan kerangka teoritis sebagai pendukung dalam penelitian ini agar terarah, dengan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Tinjauan Tentang *Civic Literacy*

a) Pengertian *Civic Literacy*

Civic literacy adalah pengetahuan literacy dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif berkewarganegaraan dalam hidup seperti mengetahui bagaimana untuk tetap selalu update dalam menerima informasi, memahami pemerintahan serta mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat baik pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan bahkan global. (Suryaningsih, 2020)

Jenkins dalam (Darmawan, 2025) menyatakan bahwa literasi kewarganegaraan atau *civic literacy* mencakup lebih dari sekadar pemahaman tentang struktur dan proses politik. Literasi ini juga mengarah pada pemahaman tentang peran individu dalam masyarakat, bagaimana membuat keputusan yang tepat, dan bagaimana berkontribusi untuk kebaikan bersama. Hal ini semakin penting dalam pendidikan, di mana siswa diajarkan tidak hanya tentang sistem pemerintahan tetapi juga tentang peran mereka sebagai warga negara yang terlibat aktif.

Dalam konteks ini, literasi kewarganegaraan diharapkan tidak hanya meningkatkan wawasan siswa tentang, sistem politik tetapi juga membentuk karakter mereka untuk berfikir kritis, berpartisipasi aktif serta memahami hak dan kewajiban mereka seperti menaati peraturan di sekolah (Hidayat, 2024)

Civic literacy tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga mencakup kapasitas individu untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan di tingkat komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus mendorong keterlibatan aktif dan langsung siswa dalam kehidupan sosial-politik, bukan sekadar memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Misalnya, model pendidikan yang lebih terbuka yang mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi kewarganegaraan dalam pembentukan individu yang baik berdampak pada ketahanan generasi muda (Raharjo et al., 2022)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *civic literacy* adalah keterampilan komprehensif yang mencakup tidak hanya pengetahuan tentang sistem pemerintahan, struktur politik, dan proses negara, tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Literasi kewarganegaraan mengharuskan individu untuk selalu mengikuti perkembangan informasi, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan membuat

keputusan yang tepat untuk kebaikan bersama di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dalam konteks pendidikan, *civic literacy* memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, seperti mematuhi peraturan dan terlibat dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teoritis tetapi juga harus mendorong keterlibatan dalam kehidupan nyata melalui diskusi, kolaborasi, dan praktik langsung dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, peningkatan *civic literacy* berkontribusi pada pembentukan generasi muda dengan karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman (Raharjo et al., 2022)

b) Langkah-Langkah Pendekatan Pembelajaran *Civic Literacy*

Pendekatan *civic literacy* dilakukan melalui beberapa tahapan pembelajaran yang bertujuan membentuk kemampuan kewarganegaraan peserta didik secara menyeluruh. Menurut Branson (Murtiningsih et al., 2022), *civic literacy* merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter demokratis.

Selain itu, *civic literacy* berperan dalam membentuk wawasan kebangsaan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi. Langkah-langkah pendekatan *civic literacy* meliputi pengenalan pengetahuan kewarganegaraan, pengembangan kesadaran kritis,

pelatihan keterampilan partisipasi, pembentukan karakter warga negara, dan penerapan dalam kehidupan nyata Tachyudin dkk (2022).

1. Pengenalan Pengetahuan Kewarganegaraan

Langkah pertama dalam pendekatan *civic literacy* adalah memberikan pengetahuan dasar mengenai kewarganegaraan. Pada tahap ini peserta didik mempelajari berbagai konsep penting seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta keberagaman sosial budaya. Menurut Sutisna dkk (2023), pemahaman mengenai nilai-nilai pancasila dan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk kesadaran peserta didik terhadap identitas nasional dan kehidupan demokrasi di era digital.

Pengetahuan kewarganegaraan menjadi dasar penting agar peserta didik memahami identitas nasional dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Menurut Vien (2020), *civic knowledge* merupakan komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan karena memberikan pemahaman mengenai prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, dan kehidupan bernegara. Dengan adanya pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu menghargai nilai-nilai kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengembangan Kesadaran Kritis

Tahap berikutnya adalah pengembangan kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Pada tahap ini peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami suatu permasalahan, menganalisis informasi, serta menilai dampak dari suatu kebijakan publik Tachyudin dkk (2022).

Kemampuan berpikir kritis sangat penting terutama pada era digital karena masyarakat dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu benar. Peserta didik perlu memiliki kemampuan literasi media agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, ujaran kebencian, maupun informasi yang menyesatkan. literasi digital memiliki hubungan erat dengan *civic literacy* karena kemampuan menganalisis informasi digital dapat membantu peserta didik menjadi warga negara yang lebih kritis dan bertanggung jawab (Rahmawati et al., 2020).

Menurut Johnson (2020), berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi sehingga seseorang mampu mengambil keputusan secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan *civic literacy* mendorong peserta didik agar lebih aktif dalam mengkaji berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat.

3. Pelatihan Keterampilan Partisipasi

Pendekatan *civic literacy* juga menekankan pentingnya keterampilan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Peserta didik dibiasakan untuk terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, musyawarah, debat, presentasi, maupun kegiatan sosial lainnya. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan pendapat, serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama. Keterampilan partisipasi sangat penting untuk membentuk warga negara yang aktif dan demokratis (Prasetyo et.al 2024).

Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan pendapat, serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama. Keterampilan partisipasi sangat penting untuk membentuk warga negara yang aktif dan demokratis. Menurut Winataputra (2020), *civic skills* merupakan kemampuan intelektual dan partisipatif yang diperlukan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain

4. Pembentukan Sikap dan Karakter Warga Negara

Selain pengetahuan dan keterampilan, pendekatan *civic literacy* juga berfokus pada pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, kepedulian sosial, dan cinta tanah air ditanamkan melalui proses pembelajaran maupun aktivitas sosial. Penguatan *civic literacy* dapat membentuk karakter kebangsaan dan meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap kehidupan sosial (Tachyudin dkk 2022).

Karakter kewarganegaraan sangat penting karena menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat. pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang memiliki moral knowing, moral feeling, dan moral action sehingga mampu bertindak sesuai nilai moral yang baik. Dalam konteks *civic literacy*, pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan perilaku positif, kerja sama sosial, penghormatan terhadap keberagaman, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama (Lickona, 2021).

5. Penerapan dalam Kehidupan Nyata

Tahap terakhir dalam pendekatan *civic literacy* adalah penerapan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran melalui tindakan nyata, seperti menjaga lingkungan, mengikuti kegiatan sosial, menaati aturan, menghormati perbedaan, dan menggunakan media sosial secara bijaksana (Tachyudin dkk 2022).(Fitri, 2023)

Sutisna dkk (2023) menjelaskan bahwa penerapan *civic literacy* ini penting agar peserta didik tidak hanya memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga mampu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Melalui praktik langsung, peserta didik akan lebih mudah memahami pentingnya nilai demokrasi, toleransi, dan partisipasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Winataputra (2020), *civic skills* merupakan kemampuan intelektual dan partisipatif yang diperlukan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, pendekatan *civic literacy* tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

c) **Komponen Civic Literacy**

Ada beberapa 3 komponen inti dari literasi kewarganegaraan (*civic literacy*), Yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*),

keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic despositions*), yang merupakan faktor penentu dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik.

a. Pengertian Civic Knowledge

Menurut Budimansyah dalam (armizah, 2020) menyatakan bahwa *civic knowledge*: “Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara.” Pengetahuan kewarganegaraan menyangkut apa yang dibutuhkan dan seharusnya dipahami oleh warga negara dengan baik.

Pendapat di atas juga sejalan dengan pendapat Komalasari dan gafur dalam (Winarningsih et al., 2021) *civic knowledge* adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara, pengetahuan kewarganegaraan mencakup materi kewarganegaraan berupa kumpulan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang wajib diajarkan kepada siswa untuk membentuk sikap dan membantu mencapai kompetensi serta tujuan. Yang dimana tujuan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis, rasional, berpartisipasi aktif, bertanggung jawab dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan serta berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.

b. Pengertian Civic Skill

Keterampilan kewarganegaraan atau *civic skill* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan

sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Civic skill* (keterampilan atau keahlian) warga negara, berfokus (Fitri, 2023).

Pada keterampilan kreativitas, inovasi, kepemimpinan, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, adaptasi, komunikasi, pengambilan keputusan, bahkan kondisi membaca, karena dalam realitas modernisasi, warga negara perlu dibekali dengan keterampilan yang komprehensif dan mumpuni (Purba et al., 2024).

Menurut Aziz Wahab dan Sapriya dalam (Hermi Yanzi, 2021) menjelaskan bahwa seorang warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan atau kemampuan, termasuk keterampilan berpikir, komunikasi, partisipasi, dan bahkan keterampilan riset untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Semua keterampilan ini diharapkan dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan terhadap sesama anggota masyarakat, sesama warga negara, bangsa, dan bahkan terhadap tuhan yang maha esa.

Misalnya, bagaimana individu (siswa) berperilaku, berpikir, bekerja, dan bertindak sebagai anggota kelas di sekolah karena mereka adalah anggota sekolah tersebut. Lebih lanjut, bagaimana mereka berperilaku, berpikir, bekerja, dan bertindak sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya. Pada akhirnya, hal ini mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas (Fitri, 2023).

c. Pengertian *Civic Disposition*

Menurut Branson dalam (Murtiningsih et al., 2022) watak kewarganegaraan atau *civic disposition* adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa atau negara. Watak kewarganegaraan merupakan komponen fundamental ketiga dari pendidikan kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan menyiratkan karakter publik dan pribadi yang esensial bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Karakter pribadi seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghormatan terhadap martabat manusia setiap individu sangatlah penting. Sementara itu, karakter publik terdiri dari kepedulian kewarganegaraan, kesopanan, penghormatan terhadap supremasi hukum, berpikir kritis, serta kesediaan untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi. Karakter- karakter ini esensial bagi keberhasilan demokrasi (Purba et al., 2024).

Civic disposition atau watak kewarganegaraan menurut Pasandra dalam (Yona et al, 2025) mengacu pada karakteristik kesadaran dan kepedulian terhadap hak orang lain, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan objektif, kepercayaan, dan kepekaan untuk hidup bersama. Pada hakikatnya, pembentukan watak kewarganegaraan pada siswa merupakan komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan. *Civic disposition* bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang berakhlak mulia, menghormati hak orang lain, taat hukum, jujur, dan

patriotik, memahami sistem pemerintahan dan cara kerjanya, memahami peran mereka sebagai warga negara, serta memahami hak dan kewajiban mereka. Lebih lanjut, watak kewarganegaraan telah menjadi bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan karena tidak hanya mengajarkan siswa untuk bersikap demokratis, kritis, dan politis, tetapi juga menumbuhkan karakter warga negara yang ideal.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa *civic literacy* terdiri dari tiga komponen inti: *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*, yang saling terkait dalam membentuk warga negara yang baik. Pengetahuan kewarganegaraan memberikan dasar pengetahuan tentang kewarganegaraan dan sistem kehidupan nasional. Keterampilan kewarganegaraan mengembangkan kemampuan untuk berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sosial-politik. Sementara itu, disposisi kewarganegaraan membentuk karakter dan sikap warga negara, seperti tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan rasa hormat terhadap hukum dan hak orang lain. Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk dasar penting dalam menciptakan warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkarakter.

d) Pendekatan Pembelajaran *Civic Literacy*

Literasi kewarganegaraan atau *civic literacy* mencakup tiga komponen utama, yaitu pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan isu-isu sosial politik, keterampilan berpikir kritis, komunikasi, serta kolaborasi; dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan komitmen terhadap keadilan

sosial(Handi Kurniyawan & Sri Wahyuni Tanshzil, 2024).

Ketiga Aspek- aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk partisipasi warga negara yang cerdas dan konstruktif. Sejalan dengan teori partisipasi aktif dan teori pembelajaran sosial, *civic literacy* diperoleh tidak hanya dari pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari (Arthaningsih et al., 2025)

Implementasi gerakan *civic literacy* di berbagai satuan pendidikan menunjukkan beberapa temuan utama yang signifikan, yaitu model pembelajaran seperti Project Based Learning (PBL), pendekatan kolaboratif, serta rancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Elaboratif (RPP) merupakan komponen kunci dalam memperkuat *civic literacy* (Hidayat, 2024).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran *civic literacy* dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan nilai-nilai moral kewarganegaraan secara terpadu, untuk membentuk peserta didik yang mampu berpartisipasi secara aktif, reflektif, dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut pendekatan pembelajaran yang menekankan pada *civic literacy*:

1) Pembelajaran Kolaboratif

Menurut Fitriasaki et al (2020) pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk belajar bersama. Pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa bekerja sama

dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama.

Dalam proses ini, mereka terlibat aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah serta saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide. Proses pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperdebatkan ide-ide baru dan mempertimbangkan apa yang telah mereka katakan sebelumnya (Fitriasari et al, 2020)

Menurut Lubis yang dikutip oleh (Rahayu et al., 2024) ia menyatakan bahwa dalam metode pendekatan kolaboratif ini siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari interaksi dan kolaborasi dengan teman sebaya. Manfaat pembelajaran kolaboratif antara lain meningkatkan kreativitas siswa, kemampuan berpikir kritis, serta rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan bertanya. Hal ini sependapat oleh (Ginting et al (2025) yang dimana metode kolaboratif untuk pelajaran PKn tidak hanya sekedar materi yang dijelaskan dan diperkenalkan saja, namun peserta didik juga diperkenalkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berpikir kritis dan tanggap terhadap permasalahan yang muncul.

2) Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning/PJBL*)

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai pusat kegiatan belajar yang dimana proyek ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis atau lisan dengan menggunakan data. Penggunaan metode *Project Based*

Learning mampu untuk meningkatkan kemampuan analisis berpikir kritis siswa untuk mengerjakan mata pelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan pentingnya siswa memiliki kemampuan analisis untuk mempersiapkan diri dan bersaing di masa depan (Adiyatma Januardi et al., 2024).

Menurut Anggraini & Wulandari,(2020) *Project Based Learning* merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang menitikberatkan pada siswa (*student centered*) dan guru ditempatkan sebagai guru motivator dalam fasilitator, dimana siswa diberi kesempatan untuk bekerja secara mandiri dalam pembelajarannya. Melalui model pembelajaran project based learning siswa akan diajak untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan secara proaktif memberikan alternatif pemecahannya, sehingga siswa memperoleh banyak manfaat baik dari segi hasil maupun pelaksanaannya (Adventyana et al., 2023).

3) Model Pembelajaran Multiliterasi

Model multiliterasi kritis merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan khususnya dalam hal meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model ini memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dengan pemikirannya. Selain itu model ini sangat memperhatikan kemampuan berbahasa siswa. Model pembelajaran multiliterasi kritis ini efektif untuk mengembangkan literasi kewarganegaraan siswa dalam hal berpikir kritis, komunikasi dan berpendapat dalam konteks pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yang terintegrasi (Rahayu *et al.*, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *civic literacy* merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif, serta nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, toleransi, dan keadilan sosial untuk membentuk warga negara yang aktif dan konstruktif. Penguatan *civic literacy* tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial sehari-hari. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif, *Project Based Learning* (PjBL), dan model multiliterasi kritis yang terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, partisipasi aktif, serta kesadaran sosial peserta didik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e) Faktor Pendukung dan Penghambat *Civic literacy*

Penerapan pendekatan pembelajaran *civic literacy* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya. *Civic literacy* mengacu pada kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan, menganalisis isu-isu publik secara kritis, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberhasilan penerapan pendekatan ini ditentukan oleh faktor pendukung maupun penghambat yang berasal dari lingkungan sekolah, guru, peserta didik, dan sumber belajar. (Hendrizar dkk. 2025)

Penguatan *civic literacy* merupakan upaya untuk membentuk warga negara yang cerdas (*smart citizens*) sekaligus berbudi pekerti luhur (*good*

citizens) melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Dalam pelaksanaan pembelajaran *civic literacy* pada mata pelajaran PKn, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses pembelajaran dalam meningkatkan sikap kritis siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan sekolah, ketersediaan sumber belajar dan bahan bacaan, keterbatasan waktu pembelajaran, rendahnya minat membaca peserta didik, serta kompetensi dan peran aktif guru (Raharjo,2022).

a. Dukungan Sekolah

Dukungan sekolah adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan sekolah yang mendorong budaya literasi, penyediaan program literasi, komitmen kepala sekolah, serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Sekolah yang memberikan dukungan terhadap kegiatan literasi akan memudahkan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mampu menganalisis berbagai persoalan publik, serta berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara. (Harahap et. al 2024)

Harahap et. al (2024) menyatakan bahwa faktor yang mendukung implementasi *civic literacy* meliputi dukungan sekolah, ketersediaan bahan bacaan, serta partisipasi aktif guru dalam membimbing peserta didik. Dukungan tersebut menjadi landasan dalam menciptakan budaya literasi yang mampu meningkatkan *civic intelligence* peserta didik. Selain itu, Tiara

dkk (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan penguatan *civic literacy* memerlukan dukungan seluruh komponen sekolah agar proses pembelajaran dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu menyikapi berbagai persoalan sosial secara bijaksana.

Sebaliknya menurut filla Dika Dkk (2024), apabila sekolah belum memberikan dukungan yang optimal, seperti belum adanya kebijakan yang mendukung budaya literasi, kurangnya komitmen dalam penyelenggaraan program literasi, atau lingkungan sekolah yang belum kondusif, maka kondisi tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Akibatnya, guru akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada literasi kewarganegaraan, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal.

b. Ketersediaan Sumber Belajar dan Bahan Bacaan

Ketersediaan sumber belajar yang memadai merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Sumber belajar dapat berupa buku, jurnal ilmiah, media digital, berita aktual, dokumen hukum, maupun berbagai referensi lain yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan. Keberagaman sumber belajar tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh informasi yang akurat, membandingkan berbagai sudut pandang, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi persoalan

sosial, politik, hukum, dan kehidupan demokrasi. (Filla Dika dkk.2024)

Harahap et al. (2024) menjelaskan bahwa tersedianya bahan bacaan yang memadai mendukung pelaksanaan budaya literasi sehingga mampu meningkatkan *civic intelligence* peserta didik. Semakin lengkap sumber belajar yang tersedia, semakin besar peluang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi dan memahami berbagai persoalan kewarganegaraan secara komprehensif. Selain itu, sumber belajar yang beragam juga mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri, meningkatkan kemampuan mencari informasi, serta membangun argumentasi berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, keterbatasan sumber belajar dan bahan bacaan dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Kurangnya koleksi buku, minimnya akses terhadap jurnal ilmiah, keterbatasan media digital, serta rendahnya akses internet menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang relevan dan terpercaya. Kondisi tersebut menghambat pengembangan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang menjadi tujuan utama pembelajaran *civic literacy*. (Rahmi gustifal dkk 2024)

c. Kompetensi dan Peran Aktif Guru

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan

sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mengarahkan peserta didik untuk menganalisis isu-isu kewarganegaraan, berdiskusi secara kritis, menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik dan profesional guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi pembelajaran *civic literacy*. (Tiara et al 2024)

Menurut Tiara et al (2024), penguatan *civic literacy* pada guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru lebih mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif, seperti diskusi, problem based learning, project based learning, maupun analisis kasus, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Sebaliknya, apabila kompetensi guru dalam memahami konsep *civic literacy* maupun strategi pembelajarannya masih terbatas, maka kondisi tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi pembelajaran. Guru cenderung menggunakan metode ceramah yang berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang memperoleh kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, maupun mengembangkan kemampuan literasi kewarganegaraan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional secara

berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. (Rahmi gustifal dkk 2024)

d. Motivasi dan Partisipasi Aktif Peserta Didik

Motivasi dan partisipasi aktif peserta didik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Pembelajaran *civic literacy* menuntut peserta didik untuk aktif mencari informasi, membaca berbagai sumber, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta menganalisis berbagai isu kewarganegaraan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih mudah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta sikap demokratis dalam proses pembelajaran. (Rahmi gustifal dkk 2024)

Partisipasi aktif peserta didik juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan *civic literacy*, yaitu membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan yang baik. (Kurniawan et al, 2025)

Menurut Dasim Budimansyah (2020), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif harus mampu mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif sehingga mereka dapat mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* secara

seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan keterlibatan peserta didik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi pembelajaran *civic literacy*.

Sebaliknya, apabila motivasi belajar peserta didik rendah, mereka cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran, kurang tertarik membaca berbagai sumber informasi, serta enggan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi maupun pemecahan masalah. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran *civic literacy* karena peserta didik tidak memperoleh pengalaman belajar yang optimal dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi kewarganegaraan. (Rahardhian, 2022)

e. Pemanfaatan Teknologi dan Media Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi pendekatan pembelajaran *civic literacy*. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi mengenai isu-isu kewarganegaraan melalui berita, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, video edukatif, maupun media digital lainnya. Penggunaan teknologi juga memungkinkan guru menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui diskusi daring, presentasi digital, kuis interaktif, dan pembelajaran berbasis proyek. (Rahmi gustifal dkk 2024)

Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, mempermudah pemahaman terhadap materi,

serta membantu peserta didik mengembangkan kemampuan literasi digital sebagai bagian dari *civic literacy*. Selain itu, teknologi dapat memperluas wawasan peserta didik terhadap berbagai isu nasional maupun global sehingga mereka mampu menganalisis informasi secara kritis dan bertanggung jawab. (Kurniawan et al, 2025)

Hendrizar et al. (2025) menyatakan bahwa pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PPKn mampu memperkuat *civic literacy* peserta didik karena memberikan akses terhadap berbagai informasi yang relevan serta mendorong peserta didik berpikir kritis dalam menyikapi isu-isu kewarganegaraan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dan media digital menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi *civic literacy*.

Sebaliknya, keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan media digital dapat menjadi faktor penghambat implementasi pembelajaran *civic literacy*. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak disertai kemampuan menyaring informasi juga dapat menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid atau hoaks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan penguatan literasi digital agar tujuan pembelajaran *civic literacy* dapat tercapai secara optimal (Handi Kurniyawan & Sri Wahyuni Tanshzil, 2024)

2. Tinjauan Tentang PKn

a) Pengertian PKn

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) atau pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang multifaset dengan konteks keilmuan lintas disiplin yang disebut interdisipliner dan multidimensional. Menurut Winataputra (2020), sifat multidimensional inilah yang menjadikan bidang studi PKn dapat dijabarkan menjadi; pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi. (R.Vien, 2020)

H.A. Kosasih Djahi dalam (Suyanti, 2020) menyatakan bahwa hakikat PKn atau pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan pembelajaran yang bersifat programatik-prosedural yang berupaya memanusiakan dan membudayakan serta memberdayakan manusia/peserta didik (diri dan kehidupannya) untuk menjadi warga negara yang baik sebagaimana dituntut oleh konstitusi atau ketentuan hukum negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur dan moral yang tertanam dalam budaya bangsa Indonesia yang diharapkan terwujud dalam bentuk perilaku hidup sehari-hari peserta didik yang dibesarkan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan bernegara.

Berdasarkan undang-undang, pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh peserta didik pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Menurut Aziz Wahab, pkn merupakan media pembelajaran yang membina peserta didik Indonesia secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, program pkn mencakup konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara. (Fitriani *et al.*, 2023).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang studi yang bersifat multidisipliner dan multidimensional yang mencakup pendidikan politik, hukum, demokrasi, nilai, moral, dan karakter bangsa. PKn berfungsi sebagai wahana untuk membentuk dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, sadar hukum, demokratis, serta bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi. Sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, PKn berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan membina generasi yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b) Tujuan PKN

Menurut depdiknas dalam (Magdalena *et al.*, 2020) tujuan dari pembelajaran PKn ialah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.

- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain,
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, menurut Maftu bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civics responsibility*), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. (Magdalena et al., 2020).

Menurut Novembri, (2022). tujuan dari mata pelajaran pkn ada 2 yaitu secara umum dan secara khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tentang pengembangan potensi peserta didik dalam semua dimensi kewarganegaraan, yaitu:
 - 1) sikap kewarganegaraan meliputi keteguhan, komitmen dan

tanggung jawab kewarganegaraan (*civic trust*, *civic* komitmen, dan tanggung jawab sipil);

2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);

3) keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan kewarganegaraan dan partisipasi (kompetensi sipil dan tanggung jawab sipil).

b. Secara khusus tujuan PPKn memuat seluruh dimensi tersebut, agar peserta didik mampu.

1) Penghayatan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan moral Pancasila secara pribadi dan sosial;

2) Mempunyai komitmen konstitusional yang didukung oleh sikap positif dan pemahaman utuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Berpikir kritis, rasional dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

4) Berperan serta secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial dan budaya

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab. PKn bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menyikapi isu kewarganegaraan, serta mendorong partisipasi aktif dan sadar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, PKn menanamkan nilai-nilai Pancasila, komitmen terhadap UUD 1945, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab sosial agar peserta didik memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sebagai bekal hidup dalam masyarakat nasional maupun global.

3. Tinjauan Tentang Sikap Kritis

a) Pengertian Sikap Kritis

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Setiap individu membutuhkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dalam situasi sulit. Setiap orang perlu menganalisis dan mengubah keadaan hidup mereka untuk membuat keputusan penting. Berpikir kritis adalah suatu proses terstruktur yang memungkinkan siswa mengevaluasi suatu masalah menurut pendapat siswa itu sendiri, karena dengan itu siswa dapat mengevaluasi suatu masalah berdasarkan pengalaman siswa melakukannya secara nyata (Rahardhian, 2022)

Sesuai dengan pernyataan Cahyono dalam (Siregar et al., 2024) salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah

berpikir kritis. Berpikir kritis dapat membantu siswa menganalisis informasi, membuat keputusan, dan memahami masalah secara mendalam. Hal ini krusial dalam membantu siswa memenuhi peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Keterampilan berpikir kritis juga diartikan sebagai proses yang jelas dan terorganisir dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, persuasi, dan analisis. Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran, Pelaksanaan PKN di sekolah menengah pertama bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai. Oleh karena itu, pembelajaran PKN juga dapat mengasah keterampilan berpikir kritis siswa agar mampu menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan pribadi hingga permasalahan dalam masyarakat, bahkan bangsa Muhibbin *et al.*, (2021).

Che F.S yang dikutip (Rahmawati et al., 2020) menyatakan bahwa siswa yang dibekali keterampilan berpikir kritis dapat membedakan apakah pendapat orang lain benar atau salah berdasarkan kebenaran dan pengetahuan ilmiah, sehingga memungkinkan mereka untuk memutuskan dan menilai apa yang benar dan apa yang salah tanpa ragu-ragu. Berpikir kritis sangat penting bagi individu untuk memenuhi tuntutan pribadi, sosial, dan profesional masyarakat yang terus berubah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Zubaidah dalam (Rahmawati et al., 2020) *Partnership for 21st Century Skills* bahwa keterampilan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa

untuk pendidikan dan dunia kerja.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21, khususnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Keterampilan ini membantu siswa menganalisis informasi, mengevaluasi permasalahan, mengambil keputusan secara rasional, serta membedakan pendapat yang benar dan salah berdasarkan pengetahuan yang ilmiah. Melalui pembelajaran PKN, kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi berbagai persoalan pribadi, sosial, maupun kebangsaan, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan pendidikan dan dunia kerja.

b) Indikator Sikap Kritis

Menurut Arends dalam (Rahmawati et al., 2020) *critical thinking* merupakan jenis berpikir penting yang memerlukan penggunaan proses kognitif analitis dan evaluatif dan terutama terdiri dari analisis argumen berdasarkan konsistensi logis dengan tujuan mengenali bias dan penalaran yang salah sehingga sangat perlu diajarkan kepada semua siswa. Menurut Noel & Parker dalam (Rahmawati et al., 2020) berbagai keterampilan dilatihkan dalam keterampilan berpikir kritis, yaitu: kemampuan mendengarkan, membaca dengan cermat, menemukan dan menentukan asumsi-asumsi dasar, serta meyakini apa yang dilakukan dengan landasan pengetahuan yang baik

Aspek indikator berpikir kritis diklasifikasikan menjadi lima menurut Ennis dalam (Rahmawati *et al.*, 2020) yaitu:

1. Memberikan penjelasan sederhana (*elementary clarification*), meliputi: memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang memerlukan penjelasan atau tantangan. Dalam kegiatan mata pelajaran pkn indikator ini menyuruh siswa untuk mengidentifikasi masalah kewarganegaraan dan menyampaikan pendapat mereka secara logis misalnya dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat
2. Membangun keterampilan dasar (*basic support*), meliputi: mempertimbangkan kredibilitas sumber dan melakukan pertimbangan observasional. Dalam mata pelajaran pkn konteks ini memberikan ruang kepada siswa untuk menilai informasi dari berbagai sumber.
3. Menarik kesimpulan (*inferensi*), meliputi: menyusun dan mempertimbangkan deduksi, menyusun dan mempertimbangkan induksi, menyusun keputusan dan mempertimbangkan hasilnya. Di konteks ini juga siswa harus membuat kesimpulan atau solusi terhadap kasus atau moral yang di bahas saat pelajaran pkn berlangsung.
4. Memberikan penjelasan lebih lanjut (*advanced clarification*), meliputi: mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, mengidentifikasi asumsi. Dalam konteks mata pelajaran pkn,

indicator ini membantu siswa dalam memahami istilah atau konsep abstrak.

5. Pengorganisasian strategi dan taktik, meliputi: menentukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Indicator ini melatih siswa dalam merencanakan tindakan nyata dan berinteraksi dengan orang lain secara demokratis.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir analitis dan evaluatif yang melibatkan kemampuan mendengarkan, membaca secara cermat, mengidentifikasi asumsi, serta menilai argumen secara logis untuk mengenali bias dan kesalahan penalaran. Indikator berpikir kritis menurut Ennis meliputi memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menarik kesimpulan, memberikan penjelasan lanjutan, serta mengatur strategi dan taktik. Dalam konteks pembelajaran PKn, indikator-indikator tersebut digunakan untuk melatih siswa mengidentifikasi masalah, menilai informasi, memahami konsep, menyusun keputusan, dan menentukan tindakan secara sistematis.

c) Keterampilan Sikap Kritis

Menurut *Change Leadership Group* dari Universitas Harvard menyatakan bahwa peserta didik memerlukan kompetensi dan keterampilan bertahan hidup dalam menghadapi kehidupan, dunia kerja dan kewarganegaraan, di abad 21 yang sangat menekankan pada tujuh keterampilan sikap kritis berikut: (1) kemampuan berpikir kritis dan

pemecahan masalah, (2) kolaborasi dan bermimpi, (3) ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, (4) inovatif dan antusias, (5) mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan maupun tulisan, (6) bersikap mampu mempersepsi dan menganalisis informasi, dan (7) memiliki rasa ingin tahu dan berimajinasi (Zubaidah, 2020).

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di abad ke- 21 memerlukan kompetensi dan keterampilan untuk bertahan hidup dalam kehidupan, dunia kerja, dan kewarganegaraan. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi, ketangkasan dan adaptasi, inovasi dan antusiasme, komunikasi efektif lisan maupun tulisan, kemampuan menganalisis informasi, serta rasa ingin tahu dan imajinasi. Ketujuh keterampilan ini menjadi landasan penting dalam menghadapi tuntutan dan dinamika abad ke-21.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian ini, diulas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penerapan pendekatan literasi kewarganegaraan dan pengembangan sikap kritis siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Tesa Lonika D.P, Handriyanto, Amallia Noviani, & Muhammad Mona Adha (2021)	Civic Literacy: Sebagai Upaya dalam Mempersiapkan Warga Negara Menuju Era Society 5.0	Kualitatif	<i>Civic literacy</i> terdiri dari <i>civic knowledge</i> , <i>civic skills</i> , dan <i>civic disposition</i> , yang membentuk warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

2.	Lilis Nurlinasari & Solihin Ichas Hamid (2018)	Efektivitas Model Multiliterasi Kritis dalam Mengembangkan <i>Civic literacy</i> Siswa SD pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa model multiliterasi kritis efektif meningkatkan kemampuan civic literacy, khususnya dalam sub-keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa.
3.	Suyanti (2020)	Implementasi model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan berfikir kritis pada pelajaran PKn siswa kelas V SDN 104208 cinta rakyat	Kualitatif	Penerapan model pembelajaran problem based learning mampu meningkatkan sikap kritis siswa, partisipasi dan kerja sama siswa dalam mata pelajaran PKn

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa pembelajaran PKn berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi kewarganegaraan, serta karakter aktif dan bertanggung jawab siswa. Berbagai model seperti media digital, literasi sekolah, multiliterasi kritis, dan pbl efektif meningkatkan partisipasi dan kemampuan analitis siswa. Secara keseluruhan, pembelajaran PKn berbasis literasi kewarganegaraan terbukti mampu menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab, dan kesadaran demokratis siswa, sejalan dengan tujuan penelitian ini.

C. Karangka Berfikir

